

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

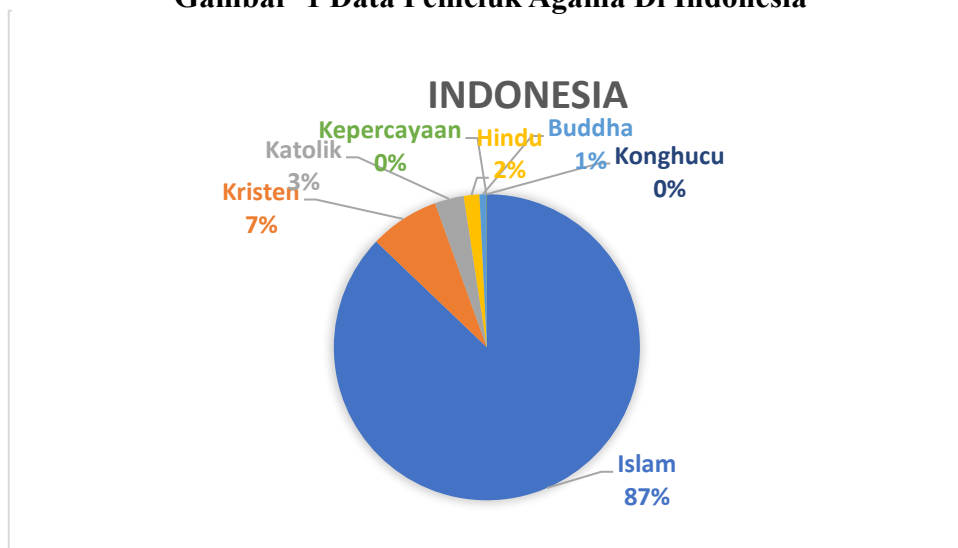
Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari aspek suku, agama, budaya, maupun bahasa. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan bangsa sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Dalam kondisi masyarakat yang majemuk, diperlukan kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang harmonis agar perbedaan yang ada tidak berkembang menjadi konflik sosial. Oleh karena itu, integrasi sosial menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat dan memperkuat persatuan bangsa.

Dalam konteks Indonesia, nilai pemersatu tersebut tercermin dalam Pancasila sebagai dasar ideologi negara sekaligus pedoman hidup bermasyarakat. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang menjadi landasan dalam membangun persatuan, toleransi, dan kehidupan sosial yang harmonis (Fadila et al., 2025). Nilai-nilai tersebut menjadi semakin penting dalam kehidupan masyarakat global yang ditandai oleh tingginya keberagaman agama serta kepercayaan, baik di tingkat global maupun nasional. Kondisi ini menegaskan bahwa pluralitas merupakan realitas sosial global yang tidak terelakkan, sehingga membutuhkan nilai

pemersatu dan mekanisme integrasi sosial untuk menjaga keharmonisan kehidupan bersama (data.goodstat, 2025).

Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia sebagai negara dengan tingkat pluralitas yang tinggi. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 286,7 juta jiwa yang terdiri atas pemeluk berbagai agama, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lainnya. Keberagaman tersebut menunjukkan pentingnya penguatan nilai persatuan dan integrasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Gambar 1 Data Pemeluk Agama Di Indonesia



Sumber : Dataindonesia.id, 2025

Komposisi ini menggambarkan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia berlangsung dalam ruang sosial yang majemuk. Keberagaman tersebut di satu sisi menjadi kekayaan sosial, namun di sisi lain berpotensi memunculkan ketegangan apabila tidak diikat oleh nilai pemersatu yang mampu menjaga integrasi dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Keberagaman agama di tingkat nasional menunjukkan struktur sosial yang kompleks, termasuk di Jawa Timur. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Timur memiliki keragaman agama, budaya, dan latar sosial yang menjadikannya penting untuk melihat bagaimana integrasi sosial dibangun dan dipertahankan di tengah perbedaan. Berikut jumlah penduduk Jawa Timur menurut agama pada 2024:

Tabel 1 Data Pemeluk Agama di Jawa Timur

Agama	Jumlah Pemeluk Agama
Islam	1.357.892 (99,47%)
Protestan	4.737 (0,35%)
Katolik	1.997 (0,15%)
Buddha	253 (0,02%)
Konghucu	165 (0,01%)
Hindu	52 (0,0%)
Aliran kepercayaan	13 (0,0%)

Sumber : Databoks, 2025

Komposisi demografis tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia didominasi oleh satu agama mayoritas, pemeluk agama lain tetap menjadi bagian penting dalam struktur sosial. Keberagaman ini tidak hanya terlihat di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal, termasuk di Bojonegoro, Jawa Timur, yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Tabel 2 Data Jumlah Pemeluk Agama di Bojonegoro

Agama	Jumlah Pemeluk Agama
Islam	1.335,740 atau 99,45 %
Kristen	4.800 jiwa atau 0,35 %
Katolik	2.119 jiwa atau 0,15 %
Hindu	57 jiwa atau 0,004 %
Buddha	256 jiwa atau 0,019 %
Konghucu	183 jiwa atau 0,014 %
Aliran kepercayaan	9 jiwa 0,013%

Sumber : Damarinfo, 2022

Keberagaman agama merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Perbedaan keyakinan, nilai, dan praktik keagamaan membentuk identitas sosial masyarakat yang beragam. Dalam situasi yang ideal, keberagaman ini dapat hidup berdampingan secara harmonis. Namun, perbedaan yang tidak diiringi nilai pemersatu dan integrasi sosial yang kuat berpotensi menimbulkan konflik. Realitas di Indonesia menunjukkan bahwa konflik bernuansa agama masih menjadi tantangan, seperti sengketa tempat ibadah di Jombang tahun 2024 (kbr.id, 2024), aksi bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya yang menewaskan 13 orang (Hastjarjo, 2018), serta konflik komunal di Ambon dan Poso, menunjukkan bahwa perbedaan agama berpotensi menimbulkan ketegangan apabila tidak dikelola dengan baik (McRae, 2016 dalam (Hastjarjo, 2018). Konflik Ambon tahun 1999–2003 bahkan menjadi salah satu konflik keagamaan terbesar yang menimbulkan korban jiwa, kerugian materi, dan keretakan hubungan antarkomunitas yang dampaknya masih dirasakan hingga kini (Ernas, 2018). Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya integrasi sosial dalam menjaga keharmonisan masyarakat yang majemuk (Daulay, 2020). Oleh karena itu, integrasi sosial menjadi kebutuhan penting dalam masyarakat majemuk.

Kabupaten Bojonegoro dikenal sebagai daerah yang relatif tidak pernah mengalami konflik antaragama yang besar. Konflik yang pernah muncul lebih bersifat internal di kalangan umat Islam, seperti perbedaan pandangan antara kelompok Majelis Tafsir Al- Qur'an (MTA) dan Nahdlatul

Ulama (NU) terkait beberapa praktik keagamaan. Namun, perbedaan tersebut tidak melibatkan pemeluk agama lain dan umumnya dapat diselesaikan melalui dialog yang melibatkan FKUB serta tokoh agama setempat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antarumat beragama di Bojonegoro tetap harmonis, sementara perbedaan pandangan di dalam satu agama dapat dikelola secara damai tanpa mengganggu kehidupan sosial masyarakat.

Keberhasilan Bojonegoro dalam memelihara kerukunan agama, yang bahkan dinilai melampaui standar nasional, menjadi latar penting bagi penelitian ini untuk menganalisis praktik integrasi sosial melalui nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat lokal. Data empiris menunjukkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kabupaten Bojonegoro telah menembus angka 82,6%. Capaian ini secara signifikan melampaui rata-rata IKUB nasional yang berada di angka 70,1%, menjadikannya lokus ideal untuk meneliti integrasi sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila (JTV Bojonegoro, 2025).

Untuk menjaga integrasi sosial dan kerukunan masyarakat, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi sosial yang kondusif melalui berbagai kebijakan dan program yang mendukung terwujudnya integrasi sosial. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui regulasi, tetapi juga melalui program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan memperkuat nilai kebangsaan, toleransi, dan partisipasi warga dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk,

negara menjalankan fungsi *to protect*, *to regulate*, dan *to service* melalui perlindungan terhadap masyarakat, pengaturan kehidupan sosial, serta penyediaan pelayanan yang mampu menjaga stabilitas dan kerukunan sosial, serta menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi masyarakat.

Di tengah masyarakat multireligi, upaya menjaga kerukunan dan integrasi sosial merupakan tantangan yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah. Untuk memperkuat toleransi, persatuan, dan gotong royong di tengah keberagaman, pemerintah mengembangkan inisiatif atau upaya penguatan nilai-nilai Pancasila yang didorong oleh pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memperkuat persatuan, toleransi, dan kerukunan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat kelompok masyarakat yang mampu hidup berdampingan secara damai meskipun warganya memiliki keyakinan yang berbeda. Dusun Kwangenrejo di Desa Leran menjadi salah satu contoh di mana perbedaan agama tidak menjadi alasan untuk saling menjauh, tetapi dikelola melalui sikap saling menghormati dan kebiasaan hidup bersama. Pola kehidupan ini mencerminkan praktik integrasi sosial yang khas dan tidak selalu ditemukan di wilayah lain. Untuk menjaga integrasi sosial dan kerukunan masyarakat, pemerintah memiliki tanggung jawab melalui berbagai kebijakan dan program sosial kemasyarakatan. Salah satu upaya yang dikembangkan adalah Kampung Pancasila.

Kampung Pancasila sudah diterapkan di berbagai wilayah, seperti di Kota Semarang, yakni di RW 03 Kelurahan Siwalan, Kecamatan

Gayamsari, Kota Semarang, Kampung Pancasila dikembangkan sebagai sarana memperkuat toleransi dan kebersamaan masyarakat melalui kegiatan gotong royong, pendidikan kebangsaan, dan aktivitas sosial lintas agama. Penelitian (Widiasari et al., 2023) Menunjukkan bahwa keberadaan Kampung Pancasila berperan dalam meningkatkan sikap saling menghormati di tengah masyarakat yang beragam. Di beberapa daerah lain, Kampung Pancasila dibentuk sebagai respons terhadap potensi konflik sosial dan intoleransi, sehingga berfungsi sebagai ruang penguatan nilai persatuan dan integrasi sosial masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat multireligi, negara telah memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama dan kehidupan yang harmonis melalui berbagai landasan normatif. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam Pancasila, khususnya sila pertama dan sila ketiga, serta diperkuat oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E dan Pasal 29 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya (RI, 1945). Perlindungan ini juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menegaskan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi kebebasan beragama dan menjalankan keyakinan (UU 39 HAM, 1999). Namun, masih munculnya berbagai tantangan dan konflik keagamaan menunjukkan bahwa jaminan hukum tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam kehidupan sosial. Pada dasarnya, regulasi keagamaan di Indonesia disusun untuk menjadi pedoman

bersama agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan beragama secara terbuka dan saling menghargai perbedaan. Selain itu, pemerintah juga mengatur pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 (Agama et al., 2006). Sementara itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2010 mengatur penyelenggaraan hari-hari besar agama Islam di tingkat kenegaraan sebagai bagian dari tata kelola kegiatan keagamaan yang harus dipahami dalam konteks pluralisme sosial (Kementerian Agama, 2010). Berbagai landasan tersebut menunjukkan bahwa kerukunan dan integrasi sosial dalam masyarakat yang beragama merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Profil Desa Leran, kehidupan keagamaan masyarakat menunjukkan adanya keberagaman dalam satu ruang sosial yang sama. Dari total 6.844 jiwa penduduk, sebanyak 6.544 jiwa beragama Islam dan sekitar 300 jiwa beragama Kristen (LERAN, 2020). Meskipun Islam menjadi agama mayoritas, pemeluk agama lain tetap menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Perbedaan keyakinan tersebut tidak berjalan secara terpisah, melainkan terjalin dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti bertetangga, gotong royong, kegiatan sosial, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Leran merupakan masyarakat yang plural sehingga memerlukan sikap saling menghormati dan kebersamaan untuk menjaga keharmonisan sosial.

Salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji adalah Dusun Kwangenrejo, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Dusun ini dikenal sebagai Kampung Pancasila karena masyarakat yang berbeda agama hidup berdampingan dalam satu lingkungan sosial yang sama. Keberadaan rumah ibadah yang saling berdekatan tersebut mencerminkan kehidupan sosial yang berlangsung rukun di tengah keberagaman agama.

Kampung Pancasila merupakan sebuah deklarasi yang merupakan inisiatif yang didorong oleh Babinsa yang bekerja sama dengan pemerintah desa sebagai upaya memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Inisiatif ini lahir sebagai respons terhadap dinamika keberagaman sosial serta kebutuhan untuk memperkuat persatuan, toleransi, gotong royong, dan kerukunan antarumat beragama. Melalui Kampung Pancasila, masyarakat didorong untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta hubungan sosial yang harmonis di tengah perbedaan. Keberadaan Kampung Pancasila di Dusun Kwangenrejo menjadi konteks yang menarik untuk memahami bagaimana integrasi sosial terbentuk dan dipelihara dalam masyarakat multireligi. Dalam perspektif Emile Durkheim, integrasi sosial dapat terwujud melalui kesadaran kolektif dan solidaritas sosial yang berkembang di antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, fenomena kehidupan masyarakat Dusun Kwangenrejo memberikan ruang yang relevan untuk

mengkaji bagaimana kesadaran kolektif dan solidaritas sosial berperan dalam mewujudkan integrasi sosial di tengah keberagaman agama.

Di Dusun Kwangenrejo terdapat dua gereja dan satu musholla yang berdekatan serta digunakan untuk beribadah oleh warga. Keberadaan rumah ibadah yang saling berdekatan menunjukkan adanya interaksi sosial dalam ruang sosial yang sama. Namun, kedekatan fisik rumah ibadah dan keberagaman agama tidak secara otomatis menciptakan kehidupan sosial yang terintegrasi. Diperlukan nilai bersama, kesadaran kolektif, dan solidaritas sosial agar masyarakat dapat hidup berdampingan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana integrasi sosial terbentuk dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Dusun Kwangenrejo sehingga mampu mewujudkan Kampung Pancasila. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana integrasi sosial dapat terbentuk dan dipertahankan dalam masyarakat yang memiliki perbedaan agama namun hidup dalam ruang sosial yang sama.

Berdasarkan observasi awal, masyarakat Dusun Kwangenrejo tetap hidup berdampingan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan adanya integrasi sosial yang, menurut Emile Durkheim, terbentuk melalui kesadaran kolektif dan solidaritas sosial. Nilai-nilai bersama yang diwujudkan dalam interaksi sosial, kerja sama, dan kegiatan kemasyarakatan mendorong terciptanya kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman agama. Dengan demikian, keberadaan Kampung Pancasila dapat dipahami sebagai ruang sosial yang

memperkuat kesadaran kolektif dan solidaritas sosial masyarakat. Integrasi sosial di Dusun Kwangenrejo tidak hanya ditandai oleh terjaganya kerukunan, tetapi juga oleh adanya keterikatan moral, kerja sama nyata, dan rasa memiliki terhadap komunitas bersama. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori integrasi sosial Emile Durkheim untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai landasan integrasi sosial dalam masyarakat multireligi di Dusun Kwangenrejo.

Berbeda dengan berbagai kasus konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia, Dusun Kwangenrejo di Desa Leran, menunjukkan kondisi sosial yang unik. Masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda hidup dan berinteraksi dalam ruang sosial yang sama, bahkan menjadi dasar terbentuknya Kampung Pancasila.

Meskipun kehidupan masyarakat terlihat harmonis, kerukunan tersebut tidak terbentuk secara otomatis. Dalam masyarakat yang memiliki perbedaan agama, integrasi sosial memerlukan adanya kesadaran bersama, kepatuhan terhadap norma sosial, serta hubungan saling ketergantungan antaranggota masyarakat. Namun, belum diketahui secara mendalam bagaimana kesadaran kolektif dan solidaritas sosial masyarakat terbentuk dan dipertahankan sehingga mampu mewujudkan serta menjaga Kampung Pancasila di Dusun Kwangenrejo. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana integrasi sosial dapat terbentuk dan dipertahankan di tengah keberagaman agama yang ada. Oleh karena itu, fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut melalui perspektif integrasi.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji kehidupan masyarakat multireligi di Dusun Kwangenrejo, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad Ainul Yaqin, 2024) Menunjukkan bahwa integrasi sosial dan toleransi antarumat beragama terbentuk melalui nilai tasamuh yang diwariskan secara turun-temurun sehingga masyarakat mampu hidup harmonis tanpa konflik keagamaan. Sementara itu, penelitian (Salsa Bila Zata Salwa, 2025) menemukan bahwa kerukunan masyarakat terbangun melalui gotong royong, interaksi lintas agama, serta penerapan nilai-nilai Islam moderat seperti toleransi, keseimbangan, dan persaudaraan. Temuan kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat multireligi di Kwangenrejo ditopang oleh nilai toleransi, interaksi sosial yang positif, dan kesadaran untuk hidup berdampingan secara harmonis. Selain itu, beberapa penelitian lain juga mengkaji Kampung Pancasila sebagai strategi resolusi konflik keagamaan, sarana harmonisasi masyarakat multireligi, serta upaya meningkatkan toleransi sosial. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji integrasi sosial masyarakat multireligi dalam konteks Kampung Pancasila melalui perspektif kesadaran kolektif dan solidaritas sosial masih relatif terbatas. Padahal, menurut Emile Durkheim, kesadaran kolektif dan solidaritas sosial merupakan unsur penting yang memungkinkan masyarakat dengan latar belakang yang beragam tetap terikat dalam suatu kehidupan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji

bagaimana Kampung Pancasila berperan dalam membentuk dan mempertahankan integrasi sosial masyarakat multireligi di Dusun Kwangenrejo.

Selain itu, integrasi sosial yang ideal juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pancasila merupakan ideologi pemersatu bangsa yang menjadi dasar pembentukan negara Indonesia serta pedoman untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila disepakati secara politik oleh para pendiri bangsa sebagai arah dan cita-cita bersama dalam menjaga persatuan serta memperkuat ketahanan nasional (Maharani et al., 2019: 279 dalam (Anik Susanti, Nyimas Nadya Izana, 2023)). Menurut (Handitya, 2019) Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral yang membimbing kehidupan sosial masyarakat serta membantu menghadapi berbagai pengaruh negatif dari luar. Sementara itu (Lennin Kartika Eka Santosa Putri, 2025) Menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila lahir dari budaya, pengalaman, dan keyakinan masyarakat Indonesia, sehingga relevan sebagai dasar pemersatu dalam kehidupan yang beragam. Disisi lain, (Widiasari et al., 2023) Menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, suku, ras, budaya, dan bahasa. Dalam kondisi masyarakat yang majemuk tersebut, Pancasila berperan penting dalam menjaga persatuan, memperkuat kesadaran kebangsaan, dan mencegah potensi konflik akibat perbedaan (Lennin Kartika Eka Santosa Putri, 2025).

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami lebih mendalam mengenai integrasi sosial masyarakat desa yang terbentuk dan mampu dipertahankan serta hidup dengan rukun melalui kesadaran kolektif dan solidaritas sosial, sehingga menjadi upaya penguatan kerukunan masyarakat di tengah keberagaman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian integrasi sosial dan Pancasila, serta memberikan manfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam memperkuat integrasi sosial serta menjaga kehidupan sosial yang harmonis dan berkelanjutan di tengah keberagaman.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk integrasi sosial yang dibangun dan dipertahankan dalam mewujudkan Kampung Pancasila yang ada di Dusun Kwangenrejo, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Dengan melihat keberagaman sosial masyarakat, tantangan perubahan sosial yang terus berlangsung, serta pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu, penelitian dengan judul “INTEGRASI SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN KAMPUNG PANCASILA (Studi Kasus Dusun Kwangenrejo Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro” .

B. Rumusan Masalah

Menurut (Sugiyono, 2013) Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang jawabannya akan dicari melalui proses pengumpulan dan analisis data. Meskipun berbeda, keduanya memiliki hubungan yang erat karena rumusan masalah harus disusun berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana integrasi sosial dalam mewujudkan Kampung Pancasila studi kasus Dusun Kwangenrejo, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk integrasi sosial masyarakat Dusun Kwangenrejo dalam mewujudkan Kampung Pancasila di Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman peneliti mengenai integrasi sosial dalam masyarakat multireligi serta penerapan teori integrasi sosial

Emile Durkheim dalam memahami kehidupan masyarakat yang beragam.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Leran dalam mempertahankan serta memperkuat integrasi sosial, kerukunan masyarakat, dan pengembangan Kampung Pancasila sebagai sarana penguatan nilai-nilai Pancasila di tengah keberagaman masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran kolektif, solidaritas sosial, dan sikap saling menghormati dalam menjaga kerukunan serta kehidupan yang harmonis di tengah perbedaan agama dan latar belakang sosial.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, sumber informasi, dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji integrasi sosial, kerukunan antarumat beragama, maupun Kampung Pancasila dalam konteks masyarakat yang beragam.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling terhubung guna memudahkan pembaca memahami alur penelitian mengenai integrasi sosial dalam mewujudkan Kampung Pancasila di Dusun Kwangenrejo. Penjelasan rinci dari setiap bagian yakni, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjabarkan konteks dan latar belakang masalah yang melandasi dilakukannya penelitian, termasuk fenomena sosial yang terjadi di lapangan, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat teoretis dan praktis yang ingin dicapai.

BAB II, TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan landasan teori dan konsep-konsep penting yang digunakan sebagai alat analisis, seperti teori integrasi sosial, nilai-nilai Pancasila, pluralitas masyarakat Indonesia, serta temuan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan informan, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi), instrumen yang digunakan, teknik analisis data, serta langkah-langkah untuk memastikan keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan Hasil dan Pembahasan yang diperoleh peneliti, berisi gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, serta pembahasan mengenai integrasi sosial masyarakat Dusun Kwangenrejo dalam mewujudkan Kampung Pancasila.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan hasil penelitian yang menjadi akhir dari penulisan penelitian ini. Pada bab ini, dijawab rumusan masalah, serta rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat, pemerintah desa, maupun peneliti selanjutnya. Bagian akhir ini memberikan ringkasan makna penelitian serta peluang pengembangan studi di masa mendatang.